

# SIARAN PERS

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

---



### **BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Serahkan LHP atas LKPD Tahun 2024 kepada 21 Pemerintah Daerah**

Medan, Senin (26 Mei 2025) – BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara lanjutkan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 kepada 21 Pemerintah Daerah.

Adapun 21 Pemerintah Daerah yang sudah menerima LHP atas LKPD Tahun 2024 dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yakni Pemkab Langkat, Labuhanbatu, Batu Bara, Padang Lawas, Tapanuli Tengah, Serdang Bedagai, Pakpak Bharat, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Nias Utara, Labuhanbatu Selatan, Mandailing Natal, Pemko Sibolga, Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Gunungsitoli, Pematangsiantar, dan Padangsidimpuan.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang dalam sambutannya menyampaikan bahwa terdapat empat aspek yang menjadi penilaian dalam Pemeriksaan LKPD untuk menentukan opini yaitu kesesuaian penyajian dengan SAP, kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, efektivitas SPI, dan kecukupan pengungkapan.

Berdasarkan penilaian atas empat aspek tersebut terhadap LKPD Tahun 2024 Pemkab Langkat, Labuhanbatu, Batu Bara, Padang Lawas, Tapanuli Tengah, dan Pemko Sibolga, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sedangkan Pemkab Serdang Bedagai, Pakpak Bharat, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Nias Utara, Labuhanbatu Selatan, Mandailing Natal, Pemko Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Gunungsitoli, Pematangsiantar, dan Padangsidimpuan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selanjutnya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengingatkan kepada sembilan Pemerintah Daerah tersebut untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

**Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara**